

**PENGARUH DANA PERIMBANGAN, BELANJA MODAL,  
DAN PINJAMAN DAERAH TERHADAP  
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO  
PADA KABUPATEN/ KOTA DI INDONESIA  
TAHUN 2016-2018**

**Skripsi**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana  
Akuntansi pada Program Studi Akuntansi**

**Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Disusun oleh:**

**Veny Chandra**

**NPM: 160423127**

**Fakultas Bisnis dan Ekonomika**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2020**

**Skripsi**

**PENGARUH DANA PERIMBANGAN, BELANJA MODAL,  
DAN PINJAMAN DAERAH TERHADAP  
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO  
PADA KABUPATEN/ KOTA DI INDONESIA  
TAHUN 2016-2018**



**Disusun oleh:**

**VENY CHANDRA**

**NPM: 16 04 23127**

Telah dibaca dan disetujui oleh:

**Pembimbing**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Heni Kurniawan", is placed below the "Pembimbing" label.

**Ch. Heni Kurniawan, Se., M.Si.**

17 Juli 2020



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
Fakultas Bisnis dan Ekonomika

## SURAT KETERANGAN

No. 630/J/I

Berdasarkan dari Ujian Pendadaran yang diselenggarakan pada hari Senin, 10 Agustus 2020 dengan susunan penguji sebagai berikut:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Ch. Heni Kurniawan, SE., M.Si.        | (Ketua Penguji) |
| 2. Ign. Novianto Hariwibowo, SE., M.Acc. | (Anggota)       |
| 3. Nuritomo, SE., M.Acc.                 | (Anggota)       |

Tim Penguji Pendadaran Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta telah memutuskan bahwa:

Nama : Veny Chandra  
NPM : 160423127

Dinyatakan

**Lulus Dengan Revisi**

Pada saat ini skripsi Veny Chandra telah selesai direvisi dan revisian tersebut telah diperiksa dan disetujui oleh semua anggota panitia penguji.

Surat Keterangan ini dibuat agar dapat digunakan untuk keperluan Yudisium kelulusan Sarjana Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika UAJY.

Dekan,

Drs. Budi Suprpto, MBA., Ph.D

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sesungguhnya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENGARUH DANA PERIMBANGAN, BELANJA MODAL,  
DAN PINJAMAN DAERAH TERHADAP  
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO  
PADA KABUPATEN/ KOTA DI INDONESIA  
TAHUN 2016-2018**

benar-benar hasil karya saya sendiri. Pernyataan, ide, maupun kutipan baik langsung maupun tak langsung yang bersumber dari tulisan atau ide orang lain dinyatakan secara tertulis dalam skripsi ini dalam catatan percut dan daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa saya melakukan plagiasi sebagian atau seluruhnya dari skripsi ini, maka gelar dan ijazah yang saya peroleh dinyatakan batal dan akan saya kembalikan pada Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yogyakarta, 17 Juli 2020

Yang menyatakan



**Veny Chandra**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Pinjaman Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto pada Kabupaten/ Kota di Indonesia tahun 2016-2018”**

Penulisan skripsi ini ditulis guna memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Akuntansi di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis menyadari terwujudnya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Berkenaan dengan itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikan petunjuk dan jalan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Ch. Heni Kurniawan, Se., M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah dengan baik hati dan sabar membimbing serta memberikan masukan dalam pengerjaan skripsi ini.
3. Kedua orang tua penulis, Katan Chandra dan Silvy Ariesandy yang senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun materiil, serta semangat yang diberikan kepada penulis selama pengerjaan skripsi berlangsung tanpa memaksakan tenggat waktu melainkan hanya mempercayai penulis. Terima kasih juga kepada adikku, Billy Chandra selalu memberikan dukungan.
4. Seluruh keluarga yang selalu mendukung dan mendoakan.
5. Alouisius Ariantoro Pratama yang telah banyak memberikan perhatian, dukungan, dan semangat kepada penulis.

6. Cicin, Ainne, Madituh, Sandja, Juanta, dan Jason sahabatku selama berkuliah di UAJY yang telah memberikan banyak bantuan, mendukung, dan memberikan motivasi kepada penulis.
7. Jessica, Rini, Melisa, Jeniffer, Risca, Cristin sahabatku di Pontianak yang juga sangat menyemangati penulis selama pengerjaan skripsi.
8. Kak Nando, Kak Wulan, Alfany, Benny, Jannes, Iga, Verina, Xina, Angie, Patria, dan masih banyak lagi nama teman yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih sudah banyak membantu.
9. Keluarga di Blanco Coffee and Books, tempat part-time penulis yang selalu mengizinkan untuk menggarap skripsi di sela-sela waktu kerja dan banyak memberikan masukan dan dukungan. Terima kasih.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis selama proses penulisan skripsi ini.

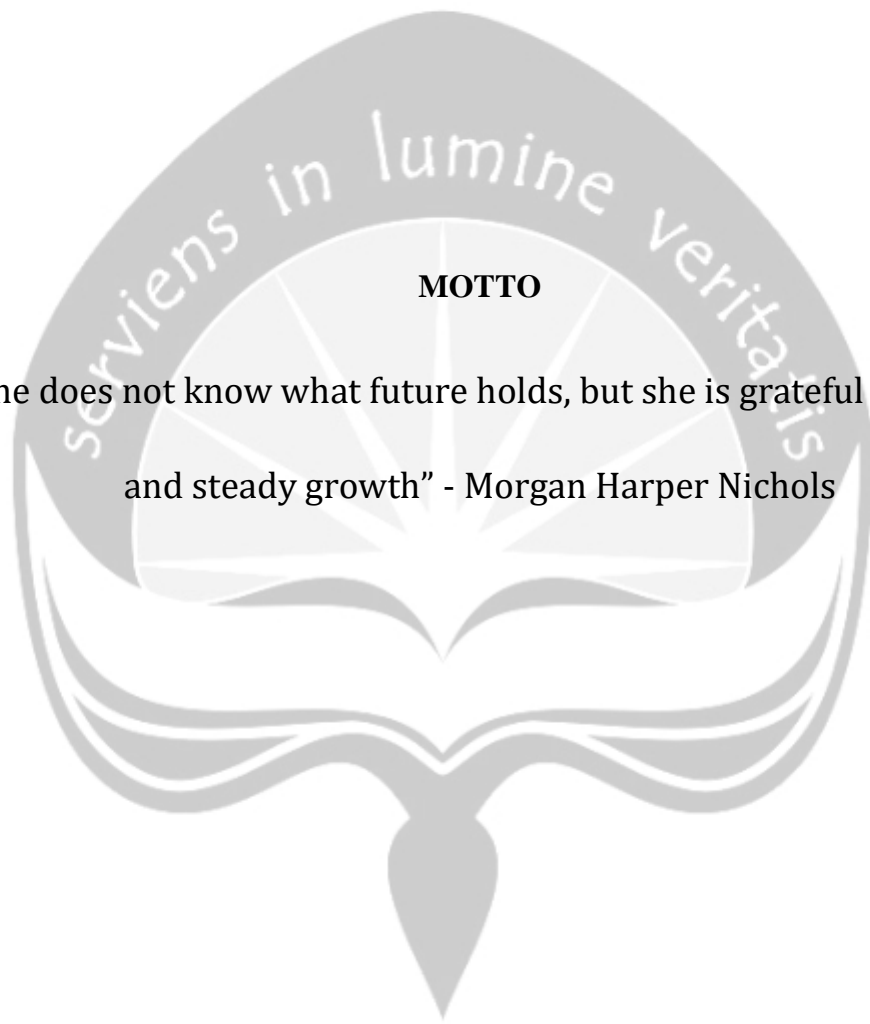
Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat berguna bagi pembaca pada umumnya dan bagi rekan-rekan mahasiswa/i pada khususnya.

Yogyakarta, 17 Juli 2020

Penulis



Veny Chandra



**MOTTO**

“She does not know what future holds, but she is grateful for slow  
and steady growth” - Morgan Harper Nichols

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
ABSTRAK.....	x
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II: DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS</b>	
2.1 Keuangan Daerah.....	8
2.2 Kemandirian Keuangan Daerah.....	8
2.2.1 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.....	9
2.3 Dana Perimbangan.....	10
2.3.1 Dana Bagi Hasil.....	11
2.3.2 Dana Alokasi Umum.....	13
2.3.3 Dana Alokasi Khusus.....	14
2.4 Belanja Modal.....	15
2.5 Pinjaman Daerah.....	17
2.6 Kerangka Konseptual.....	19
2.6.1 Agency Theory.....	19
2.6.2 Hubungan Dana Perimbangan dengan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.....	20



2.6.3	Hubungan Belanja Modal dengan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.....	20
2.6.4	Hubungan Pinjaman Daerah dengan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.....	21
2.7	Penelitian Terdahulu.....	22
2.8	Pengembangan Hipotesis.....	28
2.8.1	Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.....	28
2.8.2	Pengaruh Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.....	29
2.8.3	Pengaruh Pinjaman Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.....	30
 <b>BAB III: METODOLOGI PENELITIAN</b>		
3.1	Jenis Penelitian.....	32
3.2	Objek dan Subjek Penelitian.....	32
3.3	Populasi Penelitian.....	32
3.4	Sampel Penelitian.....	33
3.5	Variabel Penelitian.....	33
3.6	Operasionalisasi Variabel.....	34
3.7	Jenis dan Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.7.1	Jenis Data.....	36
3.7.2	Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.8	Rencana Analisa Data.....	37
3.8.1	Uji Asumsi Klasik.....	37
3.8.1.1	Uji Normalitas.....	37
3.8.1.2	Uji Multikolinearitas.....	38
3.8.1.3	Uji Heteroskedastisitas.....	38
3.8.1.4	Uji Autokorelasi.....	39
3.8.2	Analisis Statistik Deskriptif.....	39
3.9	Uji Hipotesis.....	40
3.9.1	Hipotesis Statistika.....	40
3.9.2	Tingkat Kesalahan.....	41
3.9.3	Model Pengujian Statistik.....	42
3.9.4	Teknik Pengujian.....	43
3.9.4.1	Uji Nilai t.....	43
3.9.4.2	Uji Nilai F.....	43
3.9.4.3	Uji Koefisien Determinasi.....	44
3.10	Rencana Pembahasan.....	45
 <b>BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>46</b>

4.1	Sampel Penelitian.....	46
4.2	Statistik Deskriptif.....	50
4.3	Uji Asumsi Klasik.....	53
4.3.1	Uji Normalitas.....	53
4.3.2	Uji Multikolinearitas.....	56
4.3.3	Uji Heteroskedastisitas.....	57
4.3.4	Uji Autokorelasi.....	58
4.4	Pengujian Hipotesis.....	59
4.5	Pengujian Statistik.....	61
4.5.1	Uji Nilai t.....	61
4.5.2	Uji Nilai F.....	62
4.5.3	Koefisien Determinasi.....	63
4.6	Hasil dan Pembahasan.....	64
4.6.1	Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.....	64
4.6.2	Pengaruh Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.....	65
4.6.3	Pengaruh Pinjaman Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.....	66
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN.....		68
5.1	Kesimpulan.....	68
5.2	Keterbatasan Penelitian.....	70
5.3	Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b> Hasil Penelitian Terdahulu.....	26
<b>Tabel 3.1</b> Operasional Variabel.....	37
<b>Tabel 4.1</b> Sampel Penelitian.....	49
<b>Tabel 4.2</b> Statistik Deskriptif.....	50
<b>Tabel 4.3</b> Hasil Uji Normalitas.....	53
<b>Tabel 4.4</b> Hasil Uji Normalitas setelah Trimming Data.....	54
Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas setelah Trimming Data dan Transformasi Data..	54
<b>Tabel 4.6</b> Hasil Uji Multikolinearitas.....	55
<b>Tabel 4.7</b> Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	57
<b>Tabel 4.8</b> Hasil Uji Autokorelasi.....	58
<b>Tabel 4.9</b> Hasil Pengujian Hipotesis.....	59
<b>Tabel 4.10</b> Hasil Uji Nilai F.....	61
<b>Tabel 4.11</b> Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	63

**PENGARUH DANA PERIMBANGAN, BELANJA MODAL,  
DAN PINJAMAN DAERAH TERHADAP  
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO  
PADA KABUPATEN/ KOTA DI INDONESIA  
TAHUN 2016-2018**

**Disusun Oleh:**

**Veny Chandra**

**NPM: 160423127**

**Pembimbing**

**Ch. Heni Kurniawan, SE., M.Si**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali pengaruh antara dana perimbangan, belanja modal, dan pinjaman daerah terhadap produk domestik regional bruto pada kabupaten/ kota di Indonesia dikarenakan masih terdapat kesenjangan dalam pengalokasian belanja daerah.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data arsip sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan data BPS (Badan Pusat Statistik) seluruh kabupaten/ kota di Indonesia tahun 2016-2018. Sampel dipilih menggunakan metode *purposive sampling* dan didapatkan sampel sebanyak 93 data. Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara regresi linier berganda dengan program IBM SPSS 25.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh signifikan negatif terhadap produk domestik regional bruto, belanja modal tidak berpengaruh terhadap produk domestik regional bruto, dan pinjaman daerah berpengaruh tidak berpengaruh terhadap produk domestik regional bruto.

**Kata Kunci:** Kemampuan Keuangan Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Pinjaman Daerah, Kabupaten di Indonesia

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia ditandai dengan berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 yang menghasilkan kebijakan baru mengenai hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah. Pemerintah pusat memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, hingga evaluasi dengan konsekuensi pemerintah daerah wajib meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kewajiban ini dapat diwujudkan dengan melaksanakan pelayanan masyarakat secara adil, demokratis, merata dan berkesinambungan.

Salah satu ciri utama dari suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi daerah dengan baik terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya sendiri. Tingkat ketergantungan suatu daerah kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang semakin mengecil dan diharapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah. (Efendi dan Wuryanti, 2011). Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah. Menurut Mardiasmo (2002), salah satu indikator pengukuran kinerja keuangan daerah adalah upaya fiskal yang dapat diartikan sebagai rasio antar penerimaan pajak dengan kapasitas membayar di suatu daerah. Salah satu indikator yang

digunakan untuk mengetahui kemampuan membayar pajak adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Jika Produk Domestik Regional Bruto mengalami peningkatan maka kemampuan daerah dalam membayar pajak juga akan meningkat. Dalam penelitian Andriyani dan Siregar (2013) dikatakan bahwa dengan meningkatnya produktivitas, masyarakat akan mampu membayar pajak dan pungutan lainnya sehingga akan meningkatkan pemasukan PAD. Pemasukan PAD ini menunjukkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan daerahnya sehingga meningkatnya PAD akan meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai sendiri belanja daerahnya.

Daerah yang memiliki PAD dengan kapasitas fiskal rendah mengindikasikan kemampuan keuangan daerah yang rendah. Untuk menaikkan kemampuan keuangan daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi daerahnya. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan mengalokasikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk sektor-sektor produktif di daerah tersebut. Pengalokasian proporsi belanja modal kepada sektor produktif ini selanjutnya akan mendorong adanya peningkatan investasi modal yang akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik (Harianto dan Andi, 2007). Peningkatan kualitas pelayanan publik ini akan meningkatkan daya tarik masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah yang akan berefek pada peningkatan PAD.

Untuk mengalokasikan proporsi belanja modal yang besar dibutuhkan dana yang cukup besar. Daerah yang mengalami keterbatasan dana diberi bantuan oleh

pusat berupa pemberian Dana Perimbangan. Sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004, Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan ke daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Pemberian dana perimbangan ini diharapkan dapat menjadi stimulus bagi daerah untuk meningkatkan PAD, namun seringkali direspon berbeda oleh daerah. Daerah yang diharapkan menjadi lebih mandiri justru semakin bergantung pada pemerintah pusat (Adi, 2008).

Bantuan lain yang dapat pemerintah pusat berikan kepada pemerintah daerah adalah memberikan pinjaman daerah. Pinjaman daerah adalah seluruh transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali (UU No. 33 Tahun 2004). Alternatif ini dapat dipilih oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya sehingga membuka peluang investasi serta meningkatkan pelayanan masyarakat dan mencapai kemampuan keuangan daerah yang baik.

Penelitian terdahulu yang meneliti mengenai pengaruh dana perimbangan, belanja modal, dan pinjaman daerah terhadap kemampuan keuangan daerah telah banyak dilakukan. Penelitian tersebut mengukur kemampuan keuangan daerah dengan proxy pengukuran yang berbeda-beda. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putri dan Sjadili (2013) meneliti “Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Pinjaman Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Indonesia Periode 2006-2010)”. Penelitian ini menyatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Tingkat

Kemandirian Daerah sementara Belanja Modal dan Pinjaman Daerah tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Daerah. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Purnama (2016) yang berjudul “Pengaruh Komponen PAD, *Leverage*, dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah” menunjukkan hasil berupa variabel Retribusi Daerah dan Investasi Daerah berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, variabel *Leverage* dan Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Sedangkan variabel Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ariani dan Putri (2016) yang berjudul “Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah”, bahwa variabel Belanja Modal memiliki pengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah sedangkan variabel Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Ariani (2010) yang berjudul “Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Tax Effort (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/ Kota Wilayah Eks Karesidenan Surakarta)” menunjukkan variabel Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, variabel Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Effort*, dan variabel Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Effort*.



Penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Tasikmalaya tahun 2006-2015)” yang dilakukan oleh Andriani dan Wahid (2015) menunjukkan variabel Pendapatan Asli Daerah dan variabel Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Simatupang (2016) yang berjudul “Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Utara” menunjukkan hasil berupa variabel Dana Perimbangan dan Belanja Pegawai tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah sedangkan variabel Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Saraswati (2017) yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebagai Variabel Pemoderasi pada Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Utara” menunjukkan variabel Pendapatan Asli Daerah dan variabel Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Sedangkan untuk variabel Belanja Modal tidak memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Hasil penelitian oleh Permasari (2013) yang berjudul “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi” menunjukkan variabel Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah

berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Sedangkan variabel Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

Berdasarkan ketidakkonsistenan hasil dari penelitian terdahulu, Peneliti tertarik untuk menguji kembali pengaruh variabel Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Pinjaman Daerah terhadap kemampuan keuangan daerah yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto pada Kabupaten/ Kota di Indonesia. Alasan peneliti menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai pengukuran kemampuan keuangan daerah dikarenakan variabel Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah yang sebelumnya digunakan dalam penelitian ini memiliki sifat yang identik antara variabel independen dengan variabel dependennya. Selanjutnya peneliti memilih objek penelitian ini dikarenakan masih terdapat kesenjangan dalam pengalokasian belanja daerah di Indonesia. Kesenjangan tersebut berupa Pemerintah Daerah yang masih mengutamakan anggaran belanja pegawai dibandingkan dengan alokasi untuk belanja infrastruktur. Berdasarkan data Kementerian Keuangan tahun 2018, dari anggaran belanja daerah sebesar Rp 1.153 triliun, sekitar 36% atau 410,6 triliun dialokasikan untuk belanja pegawai dan belanja barang dan jasa sebesar 23% atau 270,6 triliun sedangkan untuk belanja modal hanya sebesar 19% atau Rp 223,6 triliun. Kementerian Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa rata-rata belanja modal Pemerintah Daerah hanya mencapai 19%. Pengalokasian belanja seperti ini tidak akan bisa mempercepat pembangunan karena belanja pegawai yang lebih tinggi hanya menyejahterakan Organisasi Perangkat Daerah (katadata.co.id). Berdasarkan

alasan tersebut, maka peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai **“Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Pinjaman Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto pada Kabupaten/ Kota di Indonesia Tahun 2016-2018”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto pada Kabupaten/ Kota di Indonesia?
2. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto pada Kabupaten/ Kota di Indonesia?
3. Apakah Pinjaman Daerah berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto pada Kabupaten/ Kota di Indonesia?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji kembali pengaruh antara variabel independen (Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Pinjaman Daerah) terhadap variabel dependen (Produk Domestik Regional Bruto) pada Kabupaten/ Kota di Indonesia. Penelitian ini dilakukan di Pemerintahan Kabupaten/ Kota di Indonesia dikarenakan masih terdapat kesenjangan dalam pengalokasian belanja daerah.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1. Kontribusi Teori**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan masukan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian serupa yaitu Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Pinjaman Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto pada Kabupaten/ Kota di Indonesia.

##### **2. Kontribusi Praktek**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi Pemerintah Kabupaten/ Kota di Indonesia dalam upaya mengatasi kesenjangan pengalokasian belanja modal yang terjadi guna meningkatkan pembangunan daerah.

## **BAB II**

### **DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Keuangan Daerah**

Menurut PP No. 12 Tahun 2019, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan daerah memiliki ruang lingkup yang terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan yang dipisahkan (Halim, 2007). Yang termasuk keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan barang-barang inventaris milik daerah. Kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

#### **2.2 Kemampuan Keuangan Daerah**

Menurut Munir dalam Sijabat (2014), ciri utama yang menunjukkan suatu daerah berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah yang artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk mengali sumber-sumber keuangan sendiri, serta mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Kemampuan keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari daerahnya sendiri. Hal ini dikarenakan PAD

adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah dan dalam pelaksanaan otonomi daerah, diharapkan PAD yang mendominasi pendapatan daerah (Halim, 2007).

### **2.3 Produk Domestik Regional Bruto**

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), produk domestik regional bruto atau PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu. PDRB juga bisa didefinisikan sebagai jumlah nilai barang dan jasa akhir (netto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Besar nilai PDRB masing-masing daerah sangat tergantung pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan faktor produksi di suatu daerah. Oleh karena itu, PDRB juga dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah atau produktivitas masyarakat dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Andriyani dan Siregar (2013) mengatakan bahwa meningkatnya PDRB menggambarkan peningkatan produktivitas masyarakat yang akan mendorong kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan pungutan lainnya sehingga meningkatkan pemasukan pendapatan asli daerah (PAD). PAD menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan daerahnya. Sehingga dengan meningkatnya PAD akan meningkatkan kemampuan keuangan daerah tersebut.

PDRB yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Angka PDRB dapat dilihat dari publikasi BPS.

## 2.4 Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus (UU No. 33 Tahun 2004). Mekanisme dana perimbangan merupakan suatu sistem yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antar daerah. Pembagian keuangan dan pemerataan ini dilakukan dengan tetap memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah (Haryanto, 2006). Dana Perimbangan ini dapat dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama suatu periode (PP No.8 Tahun 2006).

Menurut Halim (2007), Dana Perimbangan dapat dihitung dengan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah. Rumus Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

### ***Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah***

$$= \frac{\text{Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

### 2.4.1 Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (PP No. 12/ 2019). Dana Bagi Hasil dapat dilihat di

Laporan Realisasi Anggaran bagian Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat khusus Dana Perimbangan. Terdapat dua jenis Dana Bagi Hasil yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar lain DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam. Penerimaan DBH Pajak bersumber dari:

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
3. Pajak Penghasilan Pasal 24 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam negeri (PPh WPOPDN) dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21).

Sedangkan penerimaan DBH Sumber Daya Alam bersumber dari:

1. Kehutanan
2. Pertambangan Umum
3. Perikanan
4. Pertambangan Minyak Bumi
5. Pertambangan Gas Bumi
6. Pertambangan Panas Bumi

Setiap daerah memiliki sektor unggulannya sendiri dalam hal keuangan. Hal ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah itu sendiri dalam menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang ada. Demikian halnya dalam sistem DBH yang bersumber dari pajak dan SDA. Mekanisme bagi hasil SDA dan pajak ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan vertikal antara pusat ke daerah, namun pola bagi hasil ini dapat memunculkan ketimpangan horisontal yang dialami



antara daerah penghasil dan non penghasil. Ketimpangan horisontal ini disebabkan oleh karakteristik daerah Indonesia yang beraneka ragam.

Daerah yang tidak memiliki SDA yang kuat tidak dapat mendapatkan penerimaan yang cukup sehingga ditetapkanlah PPh perorangan sebagai objek bagi hasil (UU No. 17 Tahun 2000). Hal ini dilakukan untuk kompensasi dan penyalaras bagi daerah-daerah yang tidak memiliki SDA tapi memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan negara (APBN). Volume perolehan pajak di daerah berasosiasi kuat dengan besarnya tingkat pendapatan sebagai basis pajak. Dengan demikian, daerah yang tingkat pendapatannya tinggi cenderung memperoleh DBH pajak yang lebih tinggi.

#### **2.4.2 Dana Alokasi Umum**

Menurut Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum dapat dilihat di Laporan Realisasi Anggaran bagian Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat khusus Dana Perimbangan. Dana Alokasi Umum diserahkan kepada kepala daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dalam melaksanakan otonomi daerah dimana dasar hukum pengalokasian dana ini sesuai dengan pasal 27 ayat 1 UU No. 33 Tahun 2004, yaitu jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya

26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan oleh APBN. Sedangkan proporsi DAU untuk daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota disesuaikan dengan kebutuhan dan kewenangan provinsi dan kabupaten/ kota. Pengalokasian DAU ini menggunakan pendekatan celah fiskal yaitu selisih antara kebutuhan.

### **2.4.3 Dana Alokasi Khusus**

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah (PP No. 12 Tahun 2019). DAK ditujukan untuk daerah khusus yang terpilih untuk tujuan khusus. Oleh karena itu, pengalokasian DAK ini sepenuhnya dalam wewenang pemerintah pusat. Dana Alokasi Khusus dapat dilihat di Laporan Realisasi Anggaran bagian Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat khusus Dana Perimbangan.

Kriteria teknis sektor atau kegiatan yang dapat dibayai dari Dana Alokasi Khusus ditetapkan oleh Menteri Teknis atau instansi terkait. Menteri Teknis adalah Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pertanian, dan Menteri Dalam Negeri (KMK No. 505/ KMK. 02/ 2004). Kegiatan yang tidak dapat dibiayai oleh DAK meliputi:

1. Biaya administrasi proyek
2. Biaya penyiapan proyek fisik

3. Biaya penelitian
4. Biaya pelatihan
5. Biaya perjalanan pegawai Daerah, dan
6. Lain-lain biaya umum sejenis

## **2.5 Belanja Modal**

Menurut UU No. 71 Tahun 2010, Belanja Modal adalah pengeluaran-pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Aset tetap dan aset lainnya yang dimaksud mempunyai karakteristik berwujud, menambah aset pemerintahan, manfaat lebih dari 1 tahun, dan nilainya relatif material. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa karakteristik Belanja Modal yaitu:

1. Pengeluaran pemerintah yang manfaatnya lebih dari 1 (satu) tahun.
2. Dapat menambah aset (kekayaan) daerah.
3. Implikasi dari pengeluaran ini akan menambah anggaran belanja rutin berupa biaya operasi dan pemeliharaan.
4. Pengeluaran pemerintah yang bersifat investasi.
5. Dalam tahun anggaran tertentu.

Dalam pasal 65 PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang termasuk kegiatan Belanja Modal antara lain:

1. Belanja Tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

2. Belanja Peralatan dan Mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
3. Belanja Bangunan dan Gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai,
4. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
5. Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada nomor 1 sampai 4, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
6. Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Semakin besar persentase alokasi belanja modal menandakan bahwa pemerintah daerah lebih produktif. Hal ini dikarenakan pada umumnya dalam

penggunaan aset, yang dihasilkan selalu berhubungan dengan pelayanan publik dan digunakan oleh masyarakat umum. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa alokasi belanja modal setiap tahunnya harus relatif besar. Alokasi belanja modal yang besar akan meningkatkan pelayanan pemerintah daerah kepada publik.

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJP), rumus Rasio Belanja Modal adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Belanja Daerah}} \times 100\%$$

## 2.6 Pinjaman Daerah

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Pinjaman Daerah adalah seluruh transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Konsep dasar pinjaman daerah adalah untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dalam Pasal 22 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah Pusat selain mengalokasikan dana perimbangan kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat juga dapat memberikan pinjaman dana/ atau hibah kepada Pemerintah Daerah. Jenis pinjaman daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004 adalah:

1. Pinjaman Jangka Pendek merupakan pinjaman daerah yang jangka waktunya kurang atau sama dengan satu tahun anggaran. Kewajiban

pembayaran kembali pinjaman meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran bersangkutan.

2. Pinjaman Jangka Menengah merupakan pinjaman daerah yang jangka waktunya lebih dari satu tahun anggaran. Kewajiban pembayaran kembali pinjaman meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah yang bersangkutan.
3. Pinjaman Jangka Panjang merupakan pinjaman daerah dalam waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain harus dilunasi pada tahun-tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan.

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, pemerintah daerah dapat melakukan peminjaman dari:

1. Pemerintah Pusat, berasal dari APBN termasuk dana investasi Pemerintah, penerusan Pinjaman Dalam Negeri, dan/ atau penerusan Pinjaman Luar Negeri.
2. Pemerintah Daerah Lain
3. Lembaga Keuangan Bank, yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah NKRI.
4. Lembaga Keuangan Bukan Bank, yaitu Lembaga pembiayaan yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah NKRI.

5. Masyarakat, berupa Obligasi Daerah yang diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri.

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, cara menghitung Pinjaman Daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Pinjaman Daerah} = \text{Total Penerimaan Pinjaman} + \text{Obligasi Daerah}$$

Jumlah seluruh penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah terdapat pada pos pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

## **2.7 Kerangka Konseptual**

### **2.7.1 Agency Theory**

Teori keagenan menurut Halim dan Syukriy (2006) adalah teori yang menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen yang salah satunya berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Pihak prinsipal akan membuat suatu kontrak dengan pihak agen dengan harapan agen akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal (dalam hal ini terjadi pendelegasian wewenang). Dalam pemerintahan, pihak yang berperan sebagai prinsipal atau pemberi wewenang adalah pemerintah pusat, sedangkan yang berperan sebagai agen atau yang melaksanakan wewenang adalah pemerintah daerah.

Sesuai pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah pusat akan mendelegasikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola pemerintahannya sendiri tetapi dalam pelaksanaannya pemerintah pusat tidak sepenuhnya lepas tangan. Salah

satu bukti campur tangan pemerintah pusat yaitu pemberian bantuan berupa dana perimbangan. Dana perimbangan diberikan untuk mendanai kebutuhan daerah dengan harapan daerah bisa mandiri dalam menghasilkan pendapatan asli daerahnya sendiri. Pendapatan asli daerah yang meningkat akan meningkatkan kemampuan keuangan suatu daerah. Namun dalam teori ini, pihak agen dalam mengelola pemerintahan daerahnya masih bergantung pada pemberian dana perimbangan yang menyebabkan kemampuan keuangan daerah tersebut menjadi rendah. Pihak agen tidak dapat bertindak sesuai kepentingan pihak prinsipal. Perbedaan kepentingan antara pihak prinsipal dan pihak agen menyebabkan munculnya teori agensi ini.

### **2.7.2 Hubungan Dana Perimbangan dengan Produk Domestik Regional Bruto**

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus (UU No. 33 Tahun 2004). Mekanisme dana perimbangan merupakan suatu sistem yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antar daerah. Oleh karena itu, jika suatu daerah menerima dana perimbangan yang lebih besar berarti daerah tersebut memiliki potensi sumber daya yang masih kurang sehingga harus diberi dana perimbangan untuk menutupi kekurangan. Pemberian dana perimbangan diharapkan dapat menjadi stimulus bagi daerah untuk meningkatkan PAD. Pemasukan PAD dapat



dilihat dari besaran nilai PDRB karena PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan masyarakat dalam membayar pajak (Mardiasmo, 2002). Daerah yang diberi dana perimbangan dan diharapkan menjadi lebih mandiri dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerahnya justru semakin bergantung pada pemerintah pusat (Adi, 2008). Ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan akan menjadikan kemampuan keuangan daerah tersebut menurun.

### **2.7.3 Hubungan Belanja Modal dengan Produk Domestik Regional Bruto**

Menurut UU No. 71 Tahun 2010, Belanja Modal adalah pengeluaran-pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Aset tetap dan aset lainnya yang dimaksud mempunyai karakteristik berwujud, menambah aset pemerintahan, manfaat lebih dari 1 tahun, dan nilainya relatif material. Dalam upaya peningkatan kemandirian keuangan daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengalokasikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor produktif di daerah. Pengalokasian proporsi belanja modal kepada sektor produktif ini selanjutnya akan mendorong adanya peningkatan investasi modal yang akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik (Harianto dan Adi, 2007). Peningkatan kualitas pelayanan publik ini akan meningkatkan daya tarik masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah. Berkembangnya pembangunan pada daerah tersebut

diharapkan dapat mendorong pemasukan PAD dan meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Dengan adanya pengalokasian belanja modal yang tinggi dapat meningkatkan PDRB yang mewakili kemampuan keuangan suatu daerah.

#### **2.7.4 Hubungan Pinjaman Daerah dengan Produk Domestik Regional Bruto**

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Pinjaman Daerah adalah seluruh transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Konsep dasar pinjaman daerah adalah untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan desentralisasi fiskal (PP No. 56 Tahun 2018). Sebagai alternatif sumber pembiayaan pembangunan, pinjaman daerah memiliki keuntungan yaitu mengatasi keterbatasan kemampuan riil pada saat ini dari suatu daerah yang sebenarnya memiliki potensi. Pilihan sumber pembiayaan ini dapat mengurangi ketergantungan fiskal jika dapat dipertanggungjawabkan sepanjang memenuhi berbagai persyaratan. Persyaratannya seperti kemampuan membayar kembali serta pemanfaatan yang berguna bagi pelayanan masyarakat atau pembangunan daerah sehingga kemandirian keuangan daerah dapat tercapai (Putri dan Sjadili, 2013). Dengan adanya pinjaman daerah yang dijadikan sebagai alternatif sumber pembiayaan pembangunan daerah dapat meningkatkan PDRB yang mewakili kemampuan keuangan suatu daerah.

## **2.8 Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan untuk menguji pengaruh dana perimbangan, belanja modal, dan pinjaman daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Penelitian pertama dilakukan oleh Putri dan Sjadili (2013) yang berjudul “Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Pinjaman Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Daerah”. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Indonesia Periode 2006-2010. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah software statistik Eviews versi 7. Hasil dari penelitian ini adalah Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Daerah sementara Belanja Modal dan Pinjaman Daerah tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Daerah.

Penelitian kedua dilakukan oleh Ariani dan Putri (2016) yang berjudul “Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah”. Objek dari penelitian ini adalah Kabupaten/Kota Jawa Tengah dengan periode waktu 2012-2014. Alat penelitian yang digunakan adalah program SPSS versi 20. Hasil dari penelitian ini menunjukkan variabel Belanja Modal memiliki pengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah sedangkan variabel Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Ariani (2010) yang berjudul “Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Tax Effort (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/ Kota Wilayah Eks Karesidenan Surakarta)”. Penelitian ini merupakan studi kasus pada Pemerintah Kabupaten/ Kota Wilayah Eks Karesidenan Surakarta periode 2001-

2008. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah SPSS 15. Hasil dari penelitian ini menunjukkan variabel Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, variabel Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Effort*, dan variabel Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Effort*

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Andriani dan Wahid (2015) yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah”. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota Tasikmalaya tahun 2006-2015. Alat penelitian ini adalah SPSS versi 16.00. Hasil dari penelitian ini adalah variabel Pendapatan Asli Daerah dan variabel Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Penelitian kelima penelitian yang dilakukan oleh Simatupang (2016) yang berjudul “Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Utara”. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah SPSS 20. Hasil dari penelitian ini berupa variabel Dana Perimbangan dan Belanja Pegawai tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah sedangkan variabel Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

Penelitian keenam yang dilakukan oleh Purnama (2016) yang berjudul “Pengaruh Komponen PAD, *Leverage*, dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Provinsi Lampung”. Alat uji yang digunakan adalah SPSS 21. Hasil dari penelitian ini menunjukkan variabel Retribusi Daerah dan Investasi Daerah berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, variabel *Leverage* dan Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Sedangkan variabel Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Penelitian ketujuh yang dilakukan oleh Saraswati (2017) berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebagai Variabel Pemoderasi pada Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2014”. Alat uji dalam penelitian ini adalah SPSS 21. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel Pendapatan Asli Daerah dan variabel Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Sedangkan untuk variabel Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Uji residual menunjukkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah tidak memoderasi pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

Penelitian kedelapan yang dilakukan oleh Permanasari (2013) berjudul “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi”.

Penelitian ini dilakukan pada kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2011. Alat uji dalam penelitian ini adalah SPSS. Hasil penelitian menunjukkan variabel Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Sedangkan variabel Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

Hasil pengujian penelitian terdahulu mengenai Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dapat dilihat dalam tabel 2.2

**Tabel 2.1**

**Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Variabel	Objek	Hasil
1	Putri dan Sjadili (2013)	Variabel Independen: Dana Perimbangan (X1), Belanja Modal (X2), Pinjaman Daerah (X3)  Variabel Dependen: Tingkat Kemandirian Daerah (Y)	Pemerintah Kabupaten/ Kota di Indonesia.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Daerah.</li> <li>2. Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Daerah.</li> <li>3. Pinjaman Daerah tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Daerah.</li> </ol>

2	Ariani dan Putri (2016)	<p>Variabel Independen: Belanja Modal (X1), Dana Alokasi Umum (X2)</p> <p>Variabel Dependen: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Y)</p>	Pemerintah Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.</li> <li>2. Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.</li> </ol>
3	Ariani (2010)	<p>Variabel Independen: Belanja Modal (X1), Dana Alokasi Umum (X2)</p> <p>Variabel Dependen: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Y1), <i>Tax Effort</i> (Y2)</p>	Pemerintah Kabupaten/ Kota di wilayah Eks Karesidenan Surakarta.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.</li> <li>2. Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.</li> <li>3. Belanja Modal berpengaruh positif terhadap <i>Tax Effort</i>.</li> <li>4. Dana Alokasi Umum tidak</li> </ol>

				berpengaruh terhadap <i>Tax Effort</i> .
4	Andriani dan Wahid (2015)	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Perimbangan (X2)  Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah (Y)	Pemerintah Kota Tasikmalaya.	1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. 2. Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
5	Simatupang (2016)	Variabel Independen: Dana Perimbangan (X1), Belanja Modal (X2), Belanja Pegawai (X3)  Variabel Dependen: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Y)	Pemerintah Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Utara.	1. Dana Perimbangan dan Belanja Pegawai tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah 2. Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
6.	Purnama (2016)	Variabel Independen: Pajak Daerah (X1),	Pemerintah Kabupaten/ Kota	1. Retribusi Daerah dan Investasi



		<p>Retribusi Daerah (X2), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (X3), Investasi Daerah (X4), <i>Leverage</i> (X5), Dana Perimbangan (X6)</p> <p>Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah (Y)</p>	Provinsi Lampung.	<p>Daerah berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.</p> <p>2. <i>Leverage</i> dan Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.</p> <p>3. Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.</p>
7.	Saraswati (2017)	<p>Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Perimbangan (X2), Belanja Modal (X3)</p> <p>Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Y)</p>	Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2014	<p>1. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah.</p> <p>2. Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan</p>

		Variabel Pemoderasi: Kinerja Keuangan		Ekonomi Daerah. 3. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah tidak memoderasi pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah.
8.	Permanasari (2013)	Variabel Independen: Dana Alokasi Umum (X1), Dana Alokasi Khusus (X2), Pendapatan Asli Daerah (X3), Belanja Modal (X4)  Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Y)	Kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009- 2011.	1. Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. 2. Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

## **2.9 Pengembangan Hipotesis**

### **2.9.1 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto**

Mekanisme dana perimbangan merupakan suatu sistem yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antar daerah. Oleh karena itu, daerah yang menerima alokasi dana perimbangan yang lebih besar menunjukkan bahwa daerah tersebut kekurangan sumber daya sehingga harus dilakukan pemerataan. Pemberian dana perimbangan diharapkan dapat menjadi stimulus bagi daerah untuk meningkatkan PAD. Pemasukan PAD dapat dilihat dari besaran nilai PDRB karena PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan masyarakat dalam membayar pajak (Mardiasmo, 2002). Daerah yang diberi dana perimbangan dan diharapkan menjadi lebih mandiri dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerahnya justru semakin bergantung pada pemerintah pusat (Adi, 2008). Ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan akan menjadikan PDRB yang mewakili kemampuan keuangan daerah tersebut menurun.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putri dan Sjadili (2013) menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Saraswati (2017) menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Andriani dan Wahid (2015) dan Purnama (2016) menunjukkan dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap

tingkat kemandirian keuangan daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Simatupang (2016) menyatakan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian daerah.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan bahwa terdapat dua peneliti yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Sedangkan satu peneliti menyatakan dana perimbangan berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dan satu peneliti menyatakan dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Satu peneliti menyatakan dana perimbangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**$H_{a1}$  = Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Produk Domestik Regional Bruto**

### **2.9.2 Pengaruh Belanja Modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto**

Dalam upaya peningkatan kemandirian keuangan daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengalokasikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor produktif di daerah. Pengalokasian proporsi belanja modal kepada sektor produktif ini selanjutnya akan mendorong adanya peningkatan investasi modal yang akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik (Harianto dan Adi, 2007). Peningkatan kualitas pelayanan publik ini akan meningkatkan daya tarik masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah. Dengan berkembangnya pembangunan

daerah diharapkan terjadi peningkatan pemasukan PAD sehingga meningkatkan PDRB yang mewakili kemampuan keuangan daerah.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ariani dan Putri (2016), Simatupang (2016), dan Ariani (2010) menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Sjadili (2013) menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Saraswati (2017) dan Permanasari (2013) menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan, terdapat tiga peneliti yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Sedangkan satu peneliti yang menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian daerah. Dua peneliti menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H<sub>a2</sub> = Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto**

### **2.9.3 Pengaruh Pinjaman Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah**

Konsep dasar pinjaman daerah adalah untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi

daerah dan desentralisasi fiskal (PP No. 56 Tahun 2018). Sebagai alternatif sumber pembiayaan pembangunan, pinjaman daerah memiliki keuntungan yaitu mengatasi keterbatasan kemampuan riil pada saat ini dari suatu daerah yang sebenarnya memiliki potensial. Pilihan sumber pembiayaan ini dapat mengurangi ketergantungan fiskal jika dapat dipertanggungjawabkan sepanjang memenuhi berbagai persyaratan. Persyaratannya seperti kemampuan membayar kembali serta pemanfaatan yang berguna bagi pelayanan masyarakat atau pembangunan daerah (Putri dan Sjadili, 2013). Pembangunan daerah yang dilakukan dengan melakukan pinjaman daerah selanjutnya akan meningkatkan PAD dan meningkatkan PDRB yang mewakili kemampuan keuangan daerah tersebut.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putri dan Sjadili (2013) menunjukkan bahwa pinjaman daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian daerah. Dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah. Meningkatnya pelayanan masyarakat yang dibiayai dengan pinjaman daerah dapat meningkatkan PAD yang dimana akan meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Berdasarkan teori di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H<sub>a3</sub> = Pinjaman Daerah berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto**

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Hasil analisis data dari penelitian mengenai pengaruh dana perimbangan, belanja modal, dan pinjaman daerah terhadap produk domestik regional bruto pada kabupaten/ kota di Indonesia tahun 2016-2018 menunjukkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dana perimbangan berpengaruh signifikan negatif terhadap produk domestik regional bruto pada pemerintah kabupaten/ kota di Indonesia. Meningkatnya dana perimbangan akan menurunkan produk domestik regional bruto yang mencerminkan kemampuan keuangan daerah. Hal ini dikarenakan besaran dana perimbangan menunjukkan ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat sehingga semakin besar transfer dana perimbangan ke daerah, maka akan semakin besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan daerahnya.
2. Belanja modal tidak berpengaruh terhadap produk domestik regional bruto pada kabupaten/ kota di Indonesia. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah kabupaten/ kota dalam mengalokasikan belanja daerahnya masih terdapat kesenjangan. Berdasarkan data realisasi APBD tahun anggaran 2018 diketahui bahwa anggaran belanja modal dari tahun 2017 ke tahun 2018

menurun sebesar 1,2% yaitu dari 21,6% menjadi 20,4%. Alokasi belanja modal yang kecil tidak dapat memacu pembangunan daerah dan meningkatkan kemampuan keuangan daerah.

3. Pinjaman daerah tidak berpengaruh terhadap produk domestik regional bruto pada kabupaten/ kota di Indonesia. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah kabupaten/ kota masih sedikit yang melakukan pinjaman daerah. Pemerintah daerah lebih mengandalkan transfer pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan sebagai sumber dana untuk membiayai pembangunan daerahnya.

Sesuai dengan tujuan penelitian untuk menguji kembali pengaruh antara dana perimbangan, belanja modal, dan pinjaman daerah terhadap produk domestik regional bruto pada kabupaten/ kota di Indonesia dikarenakan masih terdapat kesenjangan dalam pengalokasian belanja daerahnya maka diperoleh kesimpulan bahwa dana perimbangan berpengaruh signifikan negatif terhadap produk domestik regional bruto pada kabupaten/ kota di Indonesia. Sedangkan belanja modal dan pinjaman daerah tidak berpengaruh terhadap produk domestik regional bruto kabupaten/ kota di Indonesia. Variabel belanja modal dalam penelitian ini tidak menunjukkan adanya pengaruh yang dapat meningkatkan PDRB yang mewakili kemampuan keuangan daerah dikarenakan alokasi belanja modal yang kecil. Berdasarkan data Kementerian Keuangan tahun 2018, dari anggaran belanja daerah sebesar Rp 1.153 triliun, untuk belanja modal hanya dialokasikan sebesar 19% atau Rp 223,6 triliun sedangkan untuk belanja pegawai sekitar 36% atau 410,6 triliun. Hal ini sesuai dengan apa yang



disampaikan oleh Kementerian Keuangan, Sri Mulyani Indrawati yang menyatakan bahwa rata-rata belanja modal Pemerintah daerah hanya mencapai 19% yang dimana pengalokasian belanja seperti ini tidak dapat mempercepat pembangunan daerah karena belanja pegawai yang lebih tinggi hanya menyejahterakan Organisasi Perangkat Daerah (katadata.co.id).

## **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah hanya sedikit pemerintah kabupaten/ kota dari seluruh Indonesia yang dapat dijadikan sampel penelitian. Hal ini dikarenakan sedikitnya pemerintah kabupaten/ kota yang melakukan pinjaman daerah. Keterbatasan lain yang peneliti temukan adalah pada periode penelitian yang digunakan, masih terdapat kesenjangan dimana tingkat alokasi belanja daerah untuk belanja modal lebih rendah daripada belanja daerah lainnya yang menyebabkan belanja modal tidak berpengaruh pada tingkat kemandirian keuangan daerah.

## **5.3 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian sejenis diharapkan dapat melakukan pra survei terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian terutama pada sampel sehingga mencegah

terjadinya kekurangan/ tidak tersedianya sampel yang merupakan kelemahan riset bersifat kedaerahan.

2. Bagi pemerintah daerah diharapkan dapat mengatasi kesenjangan yang terjadi dalam pengalokasian belanja daerah yaitu dengan memberikan alokasi belanja modal yang lebih besar untuk sektor-sektor produktif di daerah agar dapat mengoptimalkan pendapatan yang diterima. Pendapatan daerah yang meningkat akan meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut.



## Daftar Pustaka

- Adi, P. H. (2008, September 6). Relevansi Transfer Pemerintah Pusat Dengan Upaya Pajak Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Jawa). *Conference Proceeding: The 2nd National Conference UKWMS*. Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana.
- \_\_\_\_\_. & Harianto, D. (2007, Juli 26-28). Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Perkapita. *Simposium Nasional Akuntansi X. ASSP-15*. Makassar: Universitas Hasanuddin.ras
- Andriani, R. R., & Wahid, N. N. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2006-2015). *Jurnal Akuntansi Volume 13*, 31-39.
- Andriyani, A., & Siregar, B. (2013). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 101-115
- Ariani, K. R., & Putri, G. A. (2016). Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Syariah Paper Accounting FEB UMS*, 364-369.
- BPS. (2019). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/ Kota di Indonesia Tahun 2014-2018*.
- Efendi, D., & Wuryanti, S. (2011). *Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Nganjuk*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19 (Edisi 5)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_. & Syukriy, A. (2006). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*. Volume 2, 53-64.
- \_\_\_\_\_. & Kusufi, M. S. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*. Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_. & Nasir, J. A. (2007). Kajian tentang Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang. *Jurnal Manajemen Usahawan Indonesia*, 42.
- Hartono, J. (2016). *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Haryanto, J. T. (2006). Kemandirian Daerah Sebuah Perspektif dengan Metode Path Analysis. *Jurnal Manajemen dan Usahawan*, Volume 35.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 505/ KMK. 02/ 2004 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2004.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Permanasari, A. W. (2013). *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2011)*. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Purnama, Wulan Ayu. (2016). *Pengaruh Komponen PAD, Leverage, dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

- Putri, F. G., & Sjadili, E. H. (2013). *Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Pinjaman Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Indonesia Periode 2006-2010)*. Skripsi, Universitas Indonesia.
- Reily, M. (2018, 12 11). *Sri Mulyani Soroti Belanja Modal Pemda yang Minim*. Retrieved from katadata.co.id: <https://katadata.co.id/berita/2018/12/11/sri-mulyani-soroti-belanja-modal-pemda-yang-minim>
- Republik Indonesia. (2000). Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan.
- \_\_\_\_\_. (2003). Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah.
- \_\_\_\_\_. (2004). Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- \_\_\_\_\_. (2010). Undang-Undang No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi.
- \_\_\_\_\_. (2018). Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2018 Tentang Pinjaman Daerah.
- \_\_\_\_\_. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Saraswati, D. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebagai Variabel Pemoderasi pada Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, Volume 8*, 44-55.
- Simatupang, F. F. (2016). *Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada*

*Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Skripsi, Universitas Sumatera Utara.*

Sijabat, S, W. (2014). Analisis Kinerja Keuangan serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2008-2012). *Jurnal Administrasi Publik*, 236-242.



**LAMPIRAN I**  
**DATA REALISASI APBD**

Realisasi APBD tahun 2016

(Dalam rupiah)							
No.	Daerah	Pendapatan	PAD	Dana Perimbangan	Belanja Daerah	Belanja Modal	Pinjaman
1	Kota Tebing Tinggi	707.957.368.508	94.058.491.717	557.996.175.287	760.702.935.123	203.355.262.407	19.335.400
2	Kota Padang	1.969.422.052.717	391.925.662.647	1.440.966.268.857	2.173.503.996.314	408.310.076.287	32.543.546.000
3	Kab. Batanghari	1.075.446.002.666	73.516.765.630	892.440.394.901	1.043.249.200.331	172.177.198.399	1.734.142.785
4	Kab. Lampung Selatan	1.825.308.495.319	184.063.778.379	1.372.433.101.822	1.864.084.864.272	470.122.016.306	72.738.167.800
5	Kab. Bandung	4.607.669.372.893	856.514.244.254	2.992.226.054.296	4.640.192.716.483	569.467.789.004	123.393.566
6	Kota Tasikmalaya	3.213.253.773.821	216.227.321.380	2.079.589.818.872	1.766.515.827.846	387.625.598.910	2.000.000.000
7	Kota Cimahi	1.218.994.660.218	286.049.615.484	783.781.903.794	1.358.743.658.898	275.139.538.669	8.319.439.000
8	Kab. Temanggung	1.678.688.079.170	281.328.148.970	1.062.555.838.091	1.739.541.988.789	398.487.295.909	28.207.575.074
9	Kab. Kulon Progo	1.358.070.874.847	180.273.363.595	957.551.588.907	1.406.491.090.412	259.878.337.190	4.248.210.169
10	Kab. Sleman	2.329.097.456.007	717.151.176.029	1.321.660.504.762	2.455.446.948.874	344.002.326.231	1.195.256.286
11	Kab. Bojonegoro	3.004.084.557.599	340.407.679.609	1.994.205.631.703	3.244.665.911.399	967.917.005.412	6.931.850.648
12	Kab. Jombang	2.257.068.907.782	374.141.185.826	1.479.449.655.860	2.364.581.573.271	364.901.756.772	708.278.761
13	Kab. Lumajang	1.842.511.574.633	242.111.541.252	1.286.208.545.624	1.934.507.119.990	616.499.721.973	1.381.935.300
14	Kab. Magetan	1.670.356.413.328	165.617.751.404	1.240.909.563.966	1.775.919.398.050	286.943.948.471	11.361.926.818
15	Kab. Nganjuk	2.097.461.647.981	323.045.177.742	1.438.057.806.688	2.201.118.780.939	447.729.508.596	854.387.670
16	Kab. Tuban	2.183.545.377.124	364.133.296.890	1.443.895.947.283	2.219.079.048.791	464.180.160.121	400.059.135
17	Kota Mojokerto	806.772.000.828	152.462.202.065	555.962.488.047	944.717.143.505	303.737.103.331	152.055.000
18	Kab. Sambas	1.530.823.553.222	102.059.036.354	1.243.434.973.577	1.589.219.116.680	327.918.328.127	54.239.000.000
19	Kab. Tapin	1.128.327.657.014	57.163.594.658	881.541.819.384	1.178.113.475.948	338.370.709.733	1.234.575.000
20	Kota Banjarmasin	1.519.640.245.461	247.258.423.246	1.113.815.696.695	1.508.186.414.715	359.361.524.199	185.737.531
21	Kab. Sangihe	927.190.925.296	55.158.721.067	763.776.691.908	943.721.535.358	187.541.072.907	21.500.000
22	Kab. Bulukumba	1.372.714.249.806	128.236.254.047	1.102.336.310.869	1.418.879.167.318	291.771.235.809	38.249.979.495
23	Kab. Gowa	1.612.246.983.359	187.176.036.300	1.225.854.162.037	1.602.546.758.748	342.475.846.814	59.000.000
24	Kota Palopo	1.004.346.574.517	134.110.076.220	807.007.722.676	1.045.044.740.835	353.661.100.667	201.200.000
25	Kab. Konawe	1.174.856.947.154	57.702.177.562	939.157.887.752	1.189.502.020.486	271.257.860.403	33.599.100.000
26	Kab. Muna	1.139.382.459.721	42.457.084.844	995.267.208.960	1.239.356.434.920	411.967.214.379	29.384.437.500
27	Kota Denpasar	1.943.164.609.042	807.042.113.054	878.197.108.565	1.871.440.897.165	257.667.927.153	2.601.650.000
28	Kab. Biak Numfor	1.130.264.813.416	22.928.633.070	815.660.259.447	1.269.134.422.675	263.743.057.603	130.000.000.000
29	Kab. Puncak	1.350.174.699.479	10.588.067.725	1.069.227.255.286	1.480.997.896.488	448.486.535.433	200.000.000.000
30	Kab. Deiyai	827.730.663.883	7.604.515.308	660.538.849.188	854.256.621.738	271.969.824.465	45.000.000.000
31	Kab. Manokwari	1.053.410.438.919	51.522.059.446	680.384.630.965	1.091.759.756.011	214.903.658.743	59.762.995.000
32	Kota Sorong	948.125.277.990	94.326.458.806	695.651.360.077	996.498.558.441	294.392.762.635	90.000.000.000
33	Kab. Teluk Bintuni	1.846.327.647.967	53.214.917.711	1.435.614.540.511	2.095.321.406.358	958.558.027.875	100.000.000.000
34	Kab. Tambrauw	1.043.517.114.923	10.348.666.767	783.205.798.830	1.112.432.614.439	383.345.779.931	47.500.000.000
35	Kab. Malinau	1.487.638.369.990	52.950.090.446	1.167.451.518.737	1.412.958.527.890	327.401.134.684	31.646.000

## Realisasi APBD Tahun 2017

(Dalam rupiah)							
No.	Daerah	Pendapatan	PAD	Dana Perimbangan	Belanja Daerah	Belanja Modal	Pinjaman
1	Kota Padang	2.092.277.707.122	548.653.179.266	1.360.290.810.177	2.077.455.348.192	397.843.408.958	25.687.637.790
2	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	992.302.734.752	56.934.787.816	801.951.800.923	957.737.987.839	393.154.584.868	53.500.000.000
3	Kab. Ciamis	2.582.166.044.870	223.076.019.909	1.714.552.477.580	2.526.057.464.021	452.171.458.810	51.540.496.987
4	Kota Tasikmalaya	3.318.577.309.403	354.840.203.843	2.083.179.479.122	3.410.282.766.639	566.130.224.362	10.000.000.000
5	Kab. Batang	1.566.154.720.814	219.807.128.307	993.464.937.327	1.563.181.721.381	163.667.905.285	10.000.000.000
6	Kab. Boyolali	2.176.496.270.254	388.014.897.386	1.354.438.480.868	2.148.428.355.037	420.149.743.344	9.500.000.000
7	Kab. Grobogan	2.426.674.663.998	440.456.238.668	1.522.597.859.511	2.553.147.904.253	603.353.904.468	175.959.184.634
8	Kab. Jepara	2.165.074.563.873	325.530.346.533	1.316.698.615.037	2.215.459.688.063	404.345.727.549	5.500.000.000
9	Kab. Rembang	1.722.252.909.030	300.319.284.807	927.645.131.515	1.829.088.241.098	353.770.714.067	17.729.980.680
10	Kota Surakarta	1.803.920.801.908	527.544.224.971	1.048.161.106.387	1.768.345.963.065	469.587.240.639	58.777.100
11	Kab. Bangkalan	2.188.064.292.577	325.525.663.296	1.452.478.980.467	2.009.248.055.038	296.055.032.741	8.333.300
12	Kab. Bojonegoro	3.024.200.425.253	448.188.138.725	1.887.900.309.658	2.827.904.711.002	573.456.669.154	2.437.597.284
13	Kab. Bengkayang	1.078.309.146.536	45.592.828.901	889.752.921.023	1.089.671.110.777	320.483.343.003	36.850.000.000
14	Kab. Sambas	1.634.003.339.884	200.322.596.712	1.227.460.944.080	1.638.897.259.025	319.523.642.410	74.960.000.000
15	Kab. Kubu Raya	1.404.723.995.630	152.023.127.899	1.043.885.758.961	1.403.224.521.932	256.173.394.537	10.000.000.000
16	Kab. Enrekang	1.000.408.602.312	99.669.276.952	765.016.962.563	987.600.100.370	200.088.477.045	106.199.818
17	Kota Palopo	934.121.533.937	167.307.131.609	707.078.730.039	963.855.112.821	288.566.513.023	2.000.000.000
18	Kota Makassar	3.416.355.218.701	1.337.231.094.232	1.672.967.166.403	3.313.623.623.887	625.019.873.537	3.580.000
19	Kab. Konawe	1.256.254.769.298	97.586.836.007	855.575.073.942	1.377.460.241.801	293.409.486.915	120.062.445.081
20	Kab. Muna	1.106.341.356.726	80.533.488.235	904.904.211.307	1.128.284.129.941	287.011.221.983	11.358.187.500
21	Kab. Biak Numfor	1.198.940.142.862	13.509.836.432	838.686.805.875	1.028.274.664.938	45.531.533.345	100.000.000.000
22	Kab. Nabire	1.231.469.575.077	47.298.707.017	991.021.363.019	1.267.066.048.547	187.770.708.731	92.855.267.000
23	Kab. Deiyai	791.863.388.309	1.969.108.723	573.669.348.939	780.941.002.266	159.576.326.899	25.000.000.000
24	Kab. Halmahera Barat	802.531.665.206	22.412.168.082	596.582.393.732	925.780.861.479	194.300.954.539	159.500.000.000
25	Kota Sorong	996.924.454.478	168.091.211.004	650.740.839.352	1.010.028.624.730	292.957.423.080	100.000.000.000
26	Kab. Teluk Bintuni	1.989.802.111.850	41.892.703.177	1.420.598.278.353	2.065.214.652.925	810.178.249.208	100.000.000.000





## Realisasi APBD tahun 2018

(Dalam rupiah)							
No.	Daerah	Pendapatan	PAD	Dana Perimbangan	Belanja Daerah	Belanja Modal	Pinjaman
1	Kab. Aceh Tengah	1.262.011.455.706	150.818.710.372	829.534.775.825	1.237.325.224.753	180.831.285.122	5.000.000.000
2	Kab. Simalungun	2.193.012.743.922	164.107.850.129	1.595.373.952.344	2.269.698.962.408	405.283.313.970	133.075.292.523
3	Kota Tebing Tinggi	717.784.276.097	114.048.354.143	540.901.919.396	746.857.086.076	203.340.069.233	39.303.000.000
4	Kab. Pakpak Bharat	535.364.896.438	20.061.207.923	425.088.931.780	516.045.557.942	118.336.626.935	6.403.620.000
5	Kota Padang	2.160.375.621.455	487.937.882.412	1.427.929.632.546	2.177.972.844.481	419.839.593.968	20.401.816.755
6	Kab. Musi Banyuasin	3.019.699.825.934	210.238.037.283	2.399.445.440.610	2.958.060.291.946	871.952.810.973	197.184.666.100
7	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	1.226.434.373.054	74.392.980.925	1.022.376.727.650	1.359.663.868.000	622.813.258.526	124.298.839.763
8	Kab. Way Kanan	1.385.711.587.666	56.764.985.088	1.023.173.721.974	1.501.095.281.556	465.984.737.871	99.163.510.000
9	Kota Bandar Lampung	2.162.096.665.249	550.275.048.130	1.364.968.467.075	2.190.205.773.409	425.199.203.339	75.332.649.300
10	Kab. Tulang Bawang Barat	946.197.873.627	27.613.469.636	725.406.877.464	966.957.669.034	381.114.574.622	18.855.612.750
11	Kab. Ciamis	2.573.609.421.909	234.610.670.215	1.627.548.414.865	2.602.915.468.682	442.374.318.119	25.000.000.000
12	Kab. Cianjur	4.017.389.955.772	569.844.590.576	2.246.193.466.963	4.000.993.750.351	928.610.308.238	2.396.840.608
13	Kab. Cirebon	3.683.068.266.640	584.810.843.482	1.709.528.600.379	3.681.465.057.398	510.923.940.462	19.800.000.000
14	Kab. Sumedang	2.749.896.713.734	432.181.933.419	1.638.676.633.162	2.690.086.609.326	410.348.713.390	21.000.000.000
15	Kota Bogor	2.328.703.432.669	912.197.971.289	1.066.762.734.201	2.406.586.936.843	455.461.723.593	55.640.573.400
16	Kota Tasikmalaya	1.837.915.314.476	280.014.887.927	1.145.172.887.845	1.914.915.379.888	374.596.059.058	4.779.069.217
17	Kab. Boyolali	2.227.780.710.062	342.957.213.726	1.438.528.619.300	2.203.112.762.252	498.972.083.904	10.500.000.000
18	Kab. Jepara	2.255.843.022.157	369.330.454.700	1.339.634.292.620	2.300.574.121.504	397.783.041.502	5.000.000.000
19	Kab. Pekalongan	2.101.449.302.497	311.288.143.682	1.288.217.218.488	2.160.758.920.323	431.412.970.525	69.525.500
20	Kab. Sragen	2.173.350.423.558	334.303.284.344	1.396.508.762.647	2.236.802.757.132	428.218.853.657	182.161.759.000
21	Kota Yogyakarta	1.736.919.997.853	667.493.075.470	867.706.455.745	1.652.727.843.524	325.092.739.056	2.550.000
22	Kab. Banyuwangi	2.997.644.018.347	450.066.949.215	1.960.992.382.687	2.753.665.811.333	480.382.663.298	218.860.543.369
23	Kab. Bojonegoro	4.823.752.241.464	425.167.970.431	3.814.660.800.562	3.085.425.470.750	601.338.047.081	1.257.393.775
24	Kab. Bengkayang	1.004.432.384.553	50.525.047.722	774.370.717.287	1.003.654.006.335	189.787.585.873	40.000.000.000
25	Kab. Sambas	1.699.544.377.805	127.663.390.963	1.252.299.914.145	1.701.221.066.217	286.654.817.076	95.000.000.000
26	Kab. Barito Selatan	993.055.937.844	81.427.860.613	810.947.108.709	990.032.213.116	204.359.109.701	3.000.000.000
27	Kab. Kotawaringin Barat	1.291.455.997.166	179.785.920.667	913.940.904.918	1.295.469.781.234	340.758.782.140	20.000.000.000
28	Kab. Penajam Paser Utara	1.231.736.333.081	70.390.460.397	947.015.386.307	1.505.316.439.337	647.844.022.767	309.688.045.059
29	Kab. Banggai	1.852.008.921.001	135.426.630.832	1.405.113.852.914	1.865.244.052.799	302.597.621.320	9.880.149.267
30	Kab. Tojo Una Una	1.009.031.688.116	50.857.832.638	763.486.382.764	837.991.383.121	194.999.895.485	2.141.332
31	Kab. Bulukumba	1.426.900.299.517	137.711.717.885	1.041.482.831.591	1.402.274.876.733	305.330.125.770	11.783.455.900
32	Kota Palopo	964.783.951.706	139.282.846.484	747.082.593.924	982.922.627.366	238.791.510.667	15.000.000.000
33	Kab. Konawe	1.239.526.900.893	76.707.518.287	885.789.142.458	1.246.425.282.886	209.044.670.974	78.260.987.118
34	Kab. Konawe Selatan	1.333.141.907.609	61.317.010.309	959.338.701.251	1.464.123.340.738	390.204.860.477	100.883.305.116
35	Kab. Gianyar	2.002.646.874.600	770.204.849.841	928.953.907.563	2.046.852.685.064	297.026.461.397	26.654.186.104
36	Kab. Lombok Tengah	1.976.693.763.599	187.324.721.971	1.449.014.029.739	2.028.961.899.494	358.935.169.908	11.189.482.500
37	Kab. Buru	887.002.382.615	46.257.089.676	732.930.073.778	939.853.601.223	262.173.037.793	50.000.000.000
38	Kab. Nabire	1.316.572.373.356	43.876.510.922	1.039.199.980.790	1.299.904.586.421	224.904.773.296	140.000.000.000
39	Kab. Keerom	1.048.373.937.128	19.490.489.558	782.093.665.437	1.171.225.960.732	315.134.943.677	200.000.000.000
40	Kab. Waropen	941.634.977.382	3.539.430.038	729.561.016.142	975.624.665.156	190.815.975.361	100.000.000.000
41	Kab. Dogiyai	893.581.168.261	10.149.077.709	688.515.341.348	862.191.139.040	181.682.830.476	15.000.000.000
42	Kab. Halmahera Selatan	1.333.621.054.502	31.501.588.899	1.048.015.530.762	1.303.680.381.056	309.085.493.189	22.125.650.550
43	Kota Sorong	956.955.474.821	114.479.184.026	634.184.126.475	1.041.835.481.920	352.965.533.290	200.000.000.000
44	Kab. Sorong Selatan	797.038.805.423	29.384.180.475	609.208.602.994	929.804.902.164	189.925.052.123	65.000.564.500
45	Kab. Teluk Bintuni	1.827.939.268.037	40.053.292.404	1.394.889.163.946	1.928.055.600.035	662.258.366.457	220.000.000.000
46	Kab. Manokwari Selatan	713.051.644.226	6.708.430.387	515.254.589.487	700.610.051.357	158.581.079.127	40.000.000.000
47	Kab. Mamuju Tengah	623.527.716.638	43.816.586.733	493.648.647.708	580.727.954.454	207.103.951.436	11.624.396.600

## LAMPIRAN II

### DATA SETELAH TRIMMING DAN TRANSFORMASI (LOG)

No	X1	X2	X3	Y
1	.6573	.1461	Rp5.000.000.000	Rp5.634.000.000
2	.7882	.2673	Rp19.335.400	Rp3.401.000.000
3	.7536	.2723	Rp39.303.000.000	Rp3.761.000.000
4	.7275	.1786	Rp133.075.000.000	Rp25.996.000.000
5	.7317	.1879	Rp32.543.546.000	Rp37.350.000.000
6	.6501	.1915	Rp25.687.637.790	Rp39.682.000.000
7	.6610	.1928	Rp20.401.816.755	Rp42.100.000.000
8	.7946	.2948	Rp197.185.000.000	Rp42.675.000.000
9	.8082	.4105	Rp53.500.000.000	Rp4.165.000.000
10	.8298	.1650	Rp1.734.142.785	Rp10.146.000.000
11	.7384	.3104	Rp99.163.510.000	Rp9.105.000.000
12	.6313	.1941	Rp75.332.649.300	Rp37.089.000.000
13	.7667	.3941	Rp18.855.612.750	Rp7.465.000.000
14	.7519	.2522	Rp72.738.167.800	Rp25.943.000.000
15	.6640	.1790	Rp51.540.496.987	Rp19.827.000.000
16	.6324	.1700	Rp25.000.000.000	Rp20.905.000.000
17	.5591	.2321	Rp2.396.840.608	Rp30.303.000.000
18	.5959	.1525	Rp21.000.000.000	Rp22.517.000.000
19	.6472	.2194	Rp2.000.000.000	Rp13.225.000.000
20	.6277	.1660	Rp10.000.000.000	Rp14.028.000.000
21	.6231	.1956	Rp4.779.069.217	Rp14.862.000.000
22	.6494	.1227	Rp123.393.566	Rp68.805.000.000
23	.6430	.2025	Rp8.319.439.000	Rp18.882.000.000
24	.6223	.1956	Rp9.500.000.000	Rp20.249.000.000
25	.6231	.2265	Rp10.500.000.000	Rp21.407.000.000
26	.6082	.1825	Rp5.500.000.000	Rp19.055.000.000
27	.5939	.1729	Rp5.000.000.000	Rp20.170.000.000
28	.6130	.1997	Rp69.525.500	Rp15.525.000.000
29	.6426	.1914	Rp182.162.000.000	Rp25.355.000.000
30	.6343	.1047	Rp10.000.000.000	Rp13.667.000.000
31	.6274	.2363	Rp175.959.000.000	Rp17.659.000.000
32	.5386	.1934	Rp17.729.980.680	Rp12.139.000.000
33	.5810	.2656	Rp58.777.100	Rp31.685.000.000
34	.6330	.2291	Rp28.207.575.074	Rp13.116.000.000
35	.4996	.1967	Rp2.550.000	Rp26.129.000.000
36	.7051	.1848	Rp4.248.210.169	Rp6.581.000.000
37	.5675	.1401	Rp1.195.256.286	Rp29.563.000.000
38	.6638	.2983	Rp6.931.850.648	Rp57.187.000.000
39	.6243	.2028	Rp2.437.597.284	Rp63.056.000.000
40	.7908	.1949	Rp1.257.393.775	Rp65.835.000.000

41	.6638	.1473	Rp8.333.300	Rp17.619.000.000
42	.6555	.1543	Rp708.278.761	Rp24.199.000.000
43	.6981	.3187	Rp1.381.935.300	Rp19.555.000.000
44	.7429	.1616	Rp11.361.926.818	Rp11.398.000.000
45	.6856	.2034	Rp854.387.670	Rp15.662.000.000
46	.6613	.2092	Rp400.059.135	Rp39.082.000.000
47	.6891	.3215	Rp152.055.000	Rp4.222.000.000
48	.8251	.2941	Rp36.850.000.000	Rp5.166.000.000
49	.7710	.1891	Rp40.000.000.000	Rp5.444.000.000
50	.8123	.2063	Rp54.239.000.000	Rp11.814.000.000
51	.7512	.1950	Rp74.960.000.000	Rp12.420.000.000
52	.7710	.1685	Rp95.000.000.000	Rp13.053.000.000
53	.7368	.1826	Rp10.000.000.000	Rp16.427.000.000
54	.8166	.2064	Rp3.000.000.000	Rp4.195.000.000
55	.7077	.2630	Rp20.000.000.000	Rp12.181.000.000
56	.7813	.2872	Rp1.234.575.000	Rp5.609.000.000
57	.7329	.2383	Rp185.737.531	Rp18.611.000.000
58	.7587	.1622	Rp9.880.149.267	Rp18.372.000.000
59	.7567	.2327	Rp2.141.332	Rp3.706.000.000
60	.8238	.1987	Rp21.500.000	Rp2.567.000.000
61	.8030	.2056	Rp38.249.979.495	Rp7.233.000.000
62	.7299	.2177	Rp11.783.455.900	Rp8.121.000.000
63	.8035	.3384	Rp201.200.000	Rp4.428.000.000
64	.7569	.2994	Rp2.000.000.000	Rp4.746.000.000
65	.7744	.2429	Rp15.000.000.000	Rp5.103.000.000
66	.7647	.2026	Rp106.199.818	Rp4.166.000.000
67	.4897	.1886	Rp3.580.000	Rp103.826.000.000
68	.7603	.2137	Rp59.000.000	Rp11.166.000.000
69	.7994	.2280	Rp33.599.100.000	Rp5.301.000.000
70	.6811	.2130	Rp120.062.000.000	Rp5.577.000.000
71	.7146	.1677	Rp78.260.987.118	Rp5.992.000.000
72	.7196	.2665	Rp100.883.000.000	Rp7.989.000.000
73	.8735	.3324	Rp29.384.437.500	Rp4.353.000.000
74	.8179	.2544	Rp11.358.187.500	Rp4.572.000.000
75	.7330	.1769	Rp11.189.482.500	Rp11.918.000.000
76	.8263	.2790	Rp50.000.000.000	Rp2.242.000.000
77	.8047	.1482	Rp92.855.267.000	Rp6.756.000.000
78	.7893	.1730	Rp140.000.000.000	Rp7.154.000.000
79	.7460	.2691	Rp200.000.000.000	Rp1.916.000.000
80	.7748	.1956	Rp100.000.000.000	Rp1.431.000.000
81	.7217	.2078	Rp130.000.000.000	Rp3.502.000.000
82	.6995	.0443	Rp100.000.000.000	Rp3.341.000.000
83	.7919	.2371	Rp22.125.650.550	Rp4.340.000.000
84	.7434	.2099	Rp159.500.000.000	Rp1.376.000.000
85	.7337	.2954	Rp90.000.000.000	Rp8.800.000.000
86	.6527	.2900	Rp100.000.000.000	Rp9.534.000.000

<b>87</b>	.6627	.3388	Rp200.000.000.000	Rp10.183.000.000
<b>88</b>	.7643	.2043	Rp65.000.564.500	Rp1.235.000.000
<b>89</b>	.7139	.3923	Rp100.000.000.000	Rp23.299.000.000
<b>90</b>	.6459	.1968	Rp59.762.995.000	Rp5.845.000.000
<b>91</b>	.7505	.3446	Rp47.500.000.000	Rp126.000.000.000
<b>92</b>	.7917	.3566	Rp11.624.396.600	Rp2.119.000.000
<b>93</b>	.7848	.2317	Rp31.646.000	Rp6.578.000.000



**LAMPIRAN III**  
**HASIL UJI ANALISIS DESKRIPTIF**

Tabel Statistik Deskriptif sebelum Trimming Data

<b>Descriptive Statistics</b>					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Dana Perimbangan (X1)	108	,4519	,8735	,705539	,0920225
Belanja Modal (X2)	108	,0443	,4581	,229461	,0745398
Pinjaman Daerah (X3)	108	2141332	3096880000 00	48612848264, 56	63613608792, 603
Produk Domestik Regional Bruto (Y)	108	1235000000	8440000000 00	58198824074, 07	167448218790 ,438
Valid N (listwise)	108				

Tabel Statistik Deskriptif setelah Trimming Data

<b>Descriptive Statistics</b>					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Dana Perimbangan (X1)	93	,4897	,8735	,709261	,0809162
Belanja Modal (X2)	93	,0443	,4105	,223818	,0652102
Pinjaman Daerah (X3)	93	2141332	2000000000 0	41303651430,8 5	53485790865,3 47
Produk Domestik Regional Bruto (Y)	93	1235000000	12600000000 0	17824602150,5 4	20532544217,0 42
Valid N (listwise)	93				

Tabel Statistik Deskriptif setelah Trimming dan Transformasi Data

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LOG_X1	93	-,31	-,06	-,1521	,05153
LOG_X2	93	-1,35	-,39	-,6693	,13566
LOG_X3	93	6,33	11,30	9,8566	1,24317
LOG_Y	93	9,09	11,10	10,0448	,42788
Valid N (listwise)	93				



**LAMPIRAN IV**  
**HASIL UJI ASUMSI KLASIK**

Tabel Uji Normalitas sebelum Trimming Data

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		108
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.3460648
	Std. Deviation	.9707734114146
		12.60000000
Most Extreme Differences	Absolute	.380
	Positive	.380
	Negative	-.264
Test Statistic		.380
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 <sup>c</sup>

Tabel Uji Normalitas setelah Trimming Data

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		93
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	-
		41536883031.1
		173100
Most Extreme Differences	Std. Deviation	32037279488.8
		7141800
	Absolute	.105
	Positive	.105
	Negative	-.079
Test Statistic		.105
Asymp. Sig. (2-tailed)		.013 <sup>c</sup>

Tabel Uji Normalitas setelah Trimming dan Transformasi Data

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		93
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,35495028
Most Extreme Differences	Absolute	,087
	Positive	,087
	Negative	-,067
Test Statistic		,087
Asymp. Sig. (2-tailed)		,079 <sup>c</sup>

Tabel Uji Multikolinearitas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant )	9,470	,387		24,493	,000		
	LOG_X1	-4,665	,784	-,562	-5,953	,000	,868	1,152
	LOG_X2	,101	,290	,032	,348	,729	,917	1,090
	LOG_X3	-,007	,031	-,020	-,219	,827	,944	1,060

a. Dependent Variable: LOG\_Y





Tabel Uji Heteroskedastisitas

**Correlations**

			Unstandardized Residual
Spearman's Rho	LOG Dana Perimbangan (X1)	Correlation Coefficient	-.062
		Sig. (2-tailed)	.556
		N	93
	LOG Belanja Modal (X2)	Correlation Coefficient	-.188
		Sig. (2-tailed)	.071
		N	93
	LOG Pinjaman Daerah	Correlation Coefficient	-.052
		Sig. (2-tailed)	.619
		N	93
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	1.000
		Sig. (2-tailed)	.
		N	93

Tabel Uji Autokorelasi

**Runs Test**

Unstandardized Residual

Test Value <sup>a</sup>	-.02452
Cases < Test Value	46
Cases >= Test Value	47
Total Cases	93
Number of Runs	39
Z	-1.772
Asymp. Sig. (2-tailed)	.076

a. Median

**LAMPIRAN V**  
**TABEL UJI HIPOTESIS**

Tabel Uji t

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	9.470	.387		24.493	.000
LOG Dana Perimbangan (X1)	-4.665	.784	-.562	-5.953	.000
LOG Belanja Modal (X2)	.101	.290	.032	.348	.729
LOG Pinjaman Daerah (X3)	-.007	.031	-.020	-.219	.827

Tabel Uji F

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5.253	3	1.751	13.444	.000 <sup>b</sup>
	Residual	11.591	89	.130		
	Total	16.044	92			

Sumber: Output yang diolah oleh peneliti, 2020

Tabel Uji Koefisien Determinasi

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.558 <sup>a</sup>	.312	.289	.36088	1.636

Sumber: Output yang diolah oleh peneliti, 2020